

Lampiran :
Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Brondong Nomor B.265/PPNBR/RC.220/XII/2021 tentang
Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara
Brondong Tahun 2020-2024



RENCANA STRATEGIS

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Tahun 2020-2024

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| BAB 1. PENDAHULUAN | |
| A . Latar Belakang | 1 |
| B . Kondisi Umum | 3 |
| C . Potensidan Permasalahan | 4 |
| D . Lingkungan Strategis | 5 |
| BAB 2. VISI, MISI, DAN TUJUAN | |
| A . Pembangunan Nasional | 7 |
| B . Pembangunan Kelautan dan Perikanan | 9 |
| C . Pembangunan Perikanan Tangkap | 11 |
| D . Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong | 15 |
| BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | |
| A . Arah Kebijakan Strategi | 19 |
| B . Kerangka Kelembagaan | 20 |
| BAB 4. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | |
| A . Target Kinerja | 21 |
| B . Kerangka Pendanaan | 22 |
| BAB 5. PENUTUP | |
| LAMPIRAN | |
| Lampiran 1: Kerangka Pendanaan | |

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pembangunan perikanan tangkap 2020-2024 memiliki keterkaitan erat secara langsung dengan agenda penguatan ekonomi serta pengembangan wilayah.

Kegiatan pembangunan sub sektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap

Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 7,53 juta ton sampai tahun 2019.

Berbagai upaya akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan merupakan ujung tombak dalam pencapaian dari satu atau beberapa program Indikator Kinerja Program yang secara langsung berimplikasi terhadap keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program, yang dijabarkan secara spesifik dalam bentuk Indikator Kinerja Kegiatan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja, berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*) khususnya dalam program pengelolaan dan pengembangan perikanan tangkap.

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan *outcome* berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong system infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi. Peningkatan peran pelabuhan perikanan

sebagai 1) pusat bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi; 2) pusat layanan dan pendataan serta ketertelusuran yang maju, andal, dan akuntabel; serta 3) Eco Fishing Port, yakni dalam menjaga mutu ikan dan standarisasi ramah lingkungan.

Mekanisme penyusunan Rencana Kinerja ini adalah diawali dengan penyusunan Indikator Kinerja dari setiap eselon IV lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yakni pada level Eselon III dan IV dengan menyajikan informasi tentang : (1) uraian singkat tentang Tugas Pokok dan Fungsi, (2) rencana dan target kinerja yang ditetapkan oleh unit kerja dengan atasan unit kerja, (3) Target kinerja, (4) Rencana Aksi serta Alokasi Anggaran pada setiap rencana Aksi/Kegiatan dan (5) Rencana Realisasi Target yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Data informasi tersebut selanjutnya disusun menjadi laporan Rencana Kinerja (Renja) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tahun 2020.

B. KONDISI UMUM

Capaian Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tahun 2015-2019 didasarkan pada realisasi pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Pembangunan perikanan tangkap memiliki 3 sasaran strategis utama yakni 1) terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan; 2) terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan, serta; 3) terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sasaran strategis PPN Brondong merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu secara periodik, melalui serangkaian program dan kegiatan tahunan dengan mempertimbangkan kebijakan dan program Ditjen Perikanan Tangkap dan beberapa pertimbangan lain diantaranya peluang, potensi, permasalahan dan kewenangan yang dimiliki PPN Brondong.

Sasaran strategis selanjutnya direpresentasikan melalui pencapaian indikator kinerja utama serta dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut, Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Rp.juta ton) mencapai 61.223,25 Ton atau realisasi 108,94% dari target 56.200 Ton, Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.Juta) mencapai 1.031.062,89 Juta atau realisasi 107,25% dari target 961.360 Juta dan Nilai PNBP (Rp.Juta) mencapai 1.390,66 Juta atau realisasi 172,51% dari target 806,12 Juta.

C. POTENSI

Kelimpahan Stok Sumberdaya Ikan akibat dari kegiatan Pemberantasan IUU Fishing, intensifikasi alat tangkap ramah lingkungan, serta upaya pro-environment lainnya telah berhasil meningkatkan stok sumber daya ikan dalam 5 tahun terakhir. Secara faktual, nelayan di beberapa lokasi pun telah merasakan kemudahan dalam usaha penangkapan ikan. Instrumen pengelolaan perikanan berbasis WPP sejauh ini seluruh kondisi prasyarat utama dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan berbasis WPP telah terpenuhi; mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang telah disusun, penetapan dan operasionalisasi Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP), maupun penetapan mekanisme pengaturan lainnya

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada awalnya merupakan Pusat Pendaratan Ikan, pada tahun 1978 status pengelolaannya ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Karena kegiatan nelayan semakin berkembang dan produksi ikan juga besar maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 428/KPTS/410/1987, tanggal 14 November 1987 secara resmi ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Nusantara (Type B).

Daerah Penangkapan *Fishing Ground* yang digunakan nelayan Brondong masih di wilayah Pantai Utara Jawa (WPP 712) yaitu perairan Bawean, Masalembu, Masalima, Lambau, Matasiri dan Kangean. Hasil

tangkapan ikan yang didaratkan di PPN Brondong termasuk ikan demersal yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti ikan Kakap Merah dan Kerapu. Infrastruktur yang cukup memadai untuk kegiatan bongkar dan sandar kapal perikanan menambah potensi rasionalisasi armada ke arah ukuran yang lebih optimal dan mampu menjamin kesinambungan ketersediaan ikan di PPN Brondong.

D. PERMASALAHAN

Permasalahan pengelolaan perikanan tangkap, khususnya pengelolaan pelabuhan perikanan tidak lepas dari dua unsur yaitu internal dan eksternal. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Internal

- Termasuk dalam WPP 712 yang sudah over fishing, dapat menghambat peningkatan produksi
- Kemampuan manajemen maupun teknis SDM yang kurang memadai
- Fasilitas yang ada belum memenuhi kebutuhan bagi pelayanan stakeholder

2. Eksternal

- Adanya duplikasi peraturan dan beragamnya jenis pungutan perikanan yang membingungkan dan menghambat pengembangan usaha perikanan
- Maraknya *IUU Fishing* diperairan teritorial dan ZEEI.
- Gangguan keamanan dan *lemahnya* penegakan hukum di laut
- Usaha perikanan masih didominasi nelayan kecil dan pemanfaatan yang bertumpuh pada perairan pantai.
- Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perikanan khususnya nelayan menyebabkan proses alih teknologi, ketrampilan tidak sesuai dengan yang diharapkan, rendahnya penyerapan informasi, rendahnya mutu ikan hasil tangkapan sehingga berdampak pada kemampuan pengembangan usaha dan rendahnya nilai jual hasil tangkapan

- Resistensi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan (perikanan) yang semakin meningkat.

E. LINGKUNGAN STRATEGIS

Pembangunan perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya akan dielaborasi pada konteks lingkungan strategis internal maupun eksternal, untuk selanjutnya sekaligus dianalisis berbagai alternatif dasar arah kebijakannya.

Secara khusus, proses identifikasi akan ditelaah sampai pada lingkup kegiatan. Metode SWOT akan digunakan sebagai dasar analisis agar proses telaah dapat dielaborasikan ke dalam lingkungan strategis, sekaligus untuk mempermudah permusan alternatif arah kebijakan.

Tabel . Matriks SWOT Kegiatan di Lingkup PPN Brondong

| | STRENGTH (S) | WEAKNESS (W) |
|---|---|---|
| | Faktor kekuatan internal: | Faktor kelemahan internal: |
| SWOT | 1. Berkembangnya Unit Pengolah Ikan (UPI) di sekitar Lokasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, dan merupakan wilayah pengembangan bagi Kabupaten Lamongan | 1. Termasuk dalam WPP 712 yang sudah over fishing, dapat menghambat peningkatan produksi |
| | 2. Komitmen pemerintah pusat dan daerah yang tinggi di bidang pengembangan perikanan dan kelautan dan didukung oleh keberadaan UPT-Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong | 2. Kemampuan manajemen maupun teknis SDM yang kurang memadai |
| | 3. Kewenangan dan tugas serta fungsi pelabuhan perikanan yang semakin luas dan jelas | 3. Fasilitas yang ada belum memenuhi kebutuhan bagi pelayanan stakeholder. |
| | 4. Tersedianya sumberdaya manusia dalam jumlah yang memadai dan dapat didayagunakan serta didukung dengan biaya operasional | |
| | 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan master plan | |
| | 6. Tersedianya data statistik dan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan yang dapat mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara bertanggungjawab | |
| | 7. Tersedia dan telah operasionalnya prasarana pengawasan terpadu di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. | |
| OPPORTUNITIES (O) | STRATEGI (SO) | STRATEGI (WO) |
| Faktor peluang eksternal: | Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang: | Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang: |
| 1. Tumbuh dan berkembangnya iklim usaha sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong peningkatan investasi di wilayah Kabupaten Lamongan | 1. Penyediaan data perikanan tangkap pada WPP 712 untuk penentuan arah kebijakan dan pengendalian upaya penangkapan di WPP 712. | 1. Penguatan kelembagaan pengelolaan perikanan di WPP 712. |
| 2. Semakin meningkatnya pangsa pasar produk perikanan baik lokal maupun nasional, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mengkonsumsi produk pangan yang bergizi dan menyehatkan. | 2. Penguatan kelembagaan di PPN Brondong. | 2. Pengembangan fasilitas di PPN Brondong dan Peningkatan pelayanan kepada stakeholder perikanan tangkap. |
| THREAT (T) | STRATEGI (ST) | STRATEGI (WT) |
| Faktor ancaman eksternal: | Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman: | Strategi yang meminimalkan |
| 1. Adanya duplikasi peraturan dan beragamnya jenis pungutan perikanan yang membingungkan dan menghambat pengembangan usaha perikanan. | 1. Pengendalian upaya penangkapan agar tidak melebihi kapasitas dan daya dukung sumber daya ikan. | 1. Memfasilitasi awak kapal perikanan untuk mendapatkan sertifikat keterampilan penangkapan ikan (SKPI). |
| 2. Maraknya IUU Fishing diperairan teritorial dan ZEEI. | 2. Melaksanakan integrasi perijinan antara pusat dan daerah. | |
| 3. Gangguan keamanan dan lemahnya penegakan hukum di laut. | 3. Memfasilitasi kegiatan Direktorat Perijinan dan kenelayanan | |
| 4. Usaha perikanan masih didominasi nelayan kecil dan pemanfaatan yang bertumpuh pada perairan pantai. | | |
| 5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perikanan khususnya nelayan menyebabkan proses alih teknologi, ketrampilan tidak sesuai dengan yang diharapkan, rendahnya penyerapan informasi, rendahnya mutu ikan hasil tangkapan sehingga berdampak pada kemampuan pengembangan usaha dan rendahnya nilai jual hasil tangkapan. | | |
| 6. Resistensi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan (perikanan) yang semakin meningkat. | | |

BAB II **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

A. Pembangunan Nasional

Visi Presiden

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi pembangunan nasional 2020-2024 akan menggunakan Visi Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

Misi Presiden

Visi Presiden diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak
- Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan
- Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Menumbuhkan Kewirausahaan
- Memperkuat Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila
- Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur
- Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0
- Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru

- Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal
- Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

Misi 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

- Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan
- Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi
- Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial
- Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan Di pedesaan
- Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga
- Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

- Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi
- Mitigasi Perubahan Iklim
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup

Misi 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

- Pembinaan Ideologi Pancasila
- Revitalisasi Revolusi Mental
- Restorasi Toleransi dan Kerukuna Sosial
- Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya
- Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan
- Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi

Misi 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

- Melanjutkan Penataan Regulasi
- Melanjutkan Reroemasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum
- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM
- Mengembangkan Budaya Sadar Hukum

Misi 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

- Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
- Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional
- Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelejen Yang Profesional dan Terpercaya

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Aktualisasi Demokrasi Pancasila
- Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
- Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi
- Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien
- Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Reformasi Pelayanan Publik

Misi 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

- Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergis
- Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah
- Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru

Tujuan Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

B. Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Peningkatan Daya Saing SDM KP
- Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, yakni:
 - a. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan
 - b. Mengembangkan inovasi dan riset kelautan dan perikanan
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, yakni:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
 - b. Meningkatkan mutu, daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yakni:
- a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati, serta
 - b. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
 - c. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, yakni:
- a. Meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi KKP

C. Pembangunan Perikanan Tangkap

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap

Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perlindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.
2. Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.

3. Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategy, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure.
4. Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh DJPT sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran program DJPT 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan nelayan meningkat, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai Tukar Nelayan (NTN);
 - b. Rata-rata pendapatan nelayan/bulan (Rp.Juta/nelayan/bulan).
2. Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 - a. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen), dengan indikator output :
 - Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit);
 - Jumlah hari layar pemantauan oleh observer di atas kapal perikanan (hari layar);

- Jumlah WPP yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber dayanya (WPP).
3. Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap sesuai ketentuan, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai PNBP Ditjen Perikanan Tangkap (Rp.Miliar), dengan indikator output:
 - Nilai PNBP SDA Ditjen Perikanan tangkap (Rp.Miliar);
 - Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan/BBPI (Rp.Miliar)
 4. Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat dan WPPNRI (persen), dengan indikator output:
 - Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP);
 - Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan (persen);
 - Jumlah lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP);
 - Jumlah sumber daya ikan perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya (lokasi).
 5. Produksi perikanan tangkap meningkat, dengan indikator kinerja:
 - a. Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton);
 - b. Nilai produksi perikanan tangkap (Rp. Triliun);
 - c. Persentase dukungan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap (persen), dengan indikator output:
 - Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan (lokasi);
 - Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan (persen);
 - Jumlah kapal perikanan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (unit);
 - Jumlah kapal yang terdaftar sebagai kapal perikanan (unit);

- Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun (unit);
- Jumlah persetujuan pengadaan kapal perikanan yang diterbitkan (unit);
- Jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan (dokumen);
- Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar (unit);
- Jumlah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun (unit);
- Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan (orang);
- Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang);
- Jumlah kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya (unit);
- Jumlah kapal perikanan bantuan yang dipantau operasionalnya, jumlah pemantauan dan standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan (provinsi);
- Jumlah alokasi izin yang diterbitkan (unit);
- Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP (SIPI/SIKPI) (unit);
- Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah (provinsi);
- Jumlah nelayan yang terlindungi (orang);
- Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan);
- Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (bidang);
- Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kelompok) (kumulatif);
- Jumlah keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya (RTP);

- Jumlah fasilitasi kawasan sentra/kampung nelayan yang tertata (lokasi);
 - Jumlah kampung nelayan maju yang tertata dan terintegrasi.
6. Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik, dengan indikator kinerja yaitu:
- a. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap (nilai), dengan indikator kinerja pendukung:
 - Persentase pelaksanaan dukungan manajemen Satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
 - Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level);
 - Indeks Efektivitas Kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks);
 - Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks);
 - Nilai SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - Nilai PMPRB UPT Pelabuhan Perikanan.
 - b. Unit berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (satker);
 - c. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen);
 - d. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup DJPT (persen);
 - e. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - f. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi anggaran DJPT TA.2019 (persen).

D. Pengelola Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan

Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Pelabuhan Perikanan melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan uraian sebagai berikut :

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan dan Fasilitasi Akses Pendanaan Modal Bagi Nelayan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Meningkatkan daya saing produk hasil perikanan dengan menyediakan kualitas ikan hasil tangkapan yang memenuhi standar mutu;
- Mewujudkan konektivitas/jejaring antar pelabuhan perikanan dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan ikan, serta
- Fasilitasi Pelaksanaan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan penyediaan serta pemanfaatan Infrastruktur/fasilitas Pelabuhan Perikanan untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

Misi 3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Menyediakan sistem data dan informasi pengelolaan perikanan tangkap yang akurat dan terkini.

Misi 4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Tujuan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Menjabarkan misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, maka tujuan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu Penumbuhan Kewirausahaan dan Fasilitasi Akses Pendanaan Modal Bagi Nelayan, penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan;

2. Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui fasilitasi pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.
3. Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan Menyediakan sistem data dan informasi pengelolaan perikanan tangkap yang akurat dan terkini serta mendukung implementasi konsep eco-infrastructure.
4. Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebagai suatu Output dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- Sasaran Program Pertama yakni “Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan indikator kinerja : Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap.
- Sasaran Program Kedua yakni “Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan indikator kinerja : Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.
- Sasaran Program Ketiga yakni “Tata kelola sumber daya perikanan tangkap ber tanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan indikator kinerja :
 - a. Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.
 - b. Jumlah rekomendasi pengelolaan SDI di WPP 712.
- Sasaran Program Keempat yakni “Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan indikator kinerja : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.
- Sasaran Program Kelima yakni “Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan indikator kinerja : Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya.
- Sasaran Program Keenam yakni “Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing dan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja : Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.
- Sasaran Program Ketujuh yakni “Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan indikator kinerja : Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya.
- Sasaran Program Kedelapan yakni “Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan

indikator kinerja : Persentase kapal perikanan yang berizin di pelabuhan perikanan Nusantara Brondong.

- Sasaran Program kesembilan yakni “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan indikator kinerja :
 - a. IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong;
 - b. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong;
 - c. Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong;
 - d. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong;
 - e. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong;
 - f. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong;
 - g. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap berbasis pengelolaan WPP secara tidak langsung mendorong secara spesifik peran infrastruktur perikanan tangkap, utamanya pelabuhan perikanan untuk semakin diarahkan sebagai sentral okasi dari setiap kegiatan perikanan tangkap di setiap WPP, serta untuk semakin mewujudkan konektivitas logistic ikan baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Artinya pelabuhan perikanan mulai memiliki tanggung jawab kewilayahan dalam menjalankan fungsinya. Untuk mendukung hal tersebut, melalui kegiatan prioritas “Pelabuhan Perikanan Unggul”, fasilitas pelabuhan perikanan akan terus dikembangkan pada tahap lebih lanjut, serta ditingkatkan perannya.

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan outcome berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong system infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sector terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi. Peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai 1) pusat bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi; 2) pusat layanan dan pendataan serta ketertelusuran yang maju, andal, dan akuntabel; serta 3) *Eco Fishing Port*, yakni dalam menjaga mutu ikan dan standarisasi ramah lingkungan.

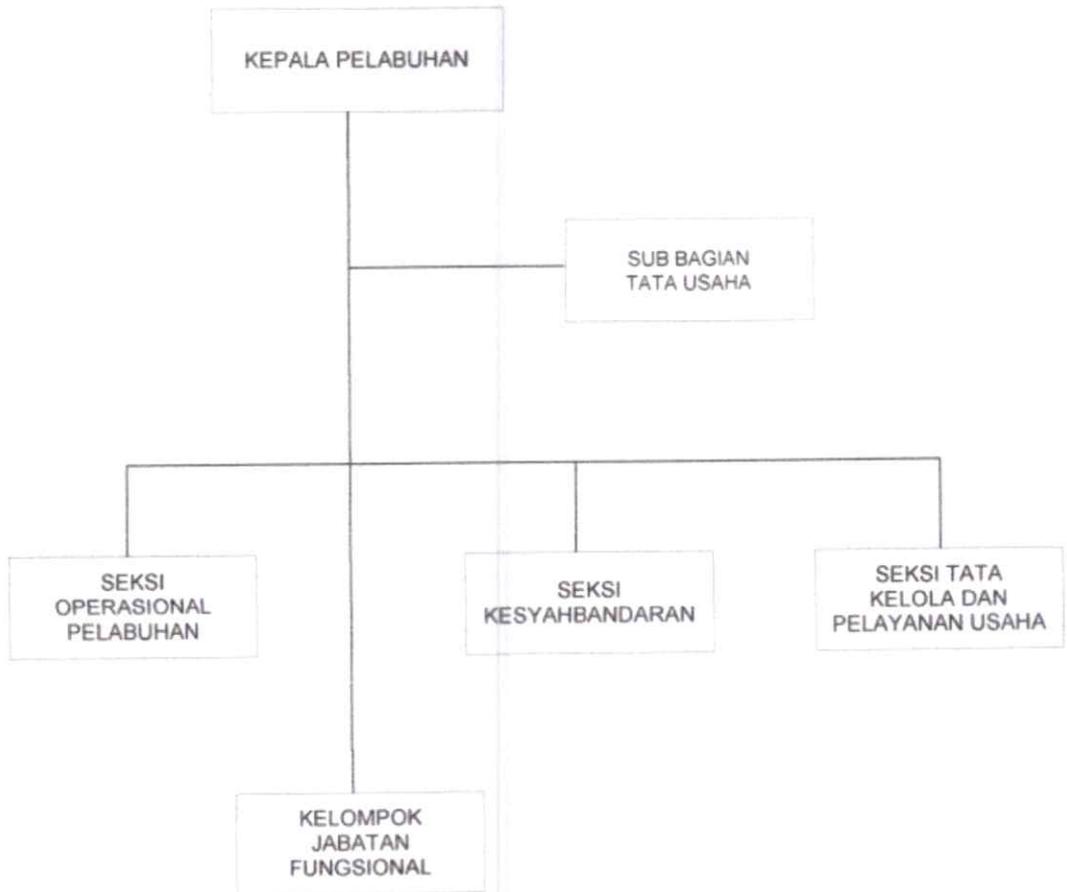
Dalam upaya fasilitasi infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, secara umum arah kebijakan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Nusantara Brondong 2020-2024 dengan beberapa indikator kegiatan secara spesifik diarahkan untuk :

- 1) Penyediaan data perikanan tangkap pada WPP 712 untuk penentuan arah kebijakan dan pengendalian upaya penangkapan di WPP 712.
- 2) Penguatan kelembagaan di PPN Brondong.
- 3) Pengembangan fasilitas di PPN Brondong dan Peningkatan pelayanan kepada *stakeholder* perikanan tangkap.
- 4) Pengendalian upaya penangkapan agar tidak melebihi kapasitas dan daya dukung sumber daya ikan.
- 5) Melaksanakan integrasi perijinan antara pusat dan daerah.
- 6) Memfasilitasi kegiatan Direktorat Perijinan dan Kenelayanan
- 7) Memfasilitasi awak kapal perikanan untuk mendapatkan sertifikat keterampilan penangkapan ikan (SKPI).

B. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara di pimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan yang membawahi Subbagian Tata Usaha, Seksi Operasional Pelabuhan, Seksi Kesyahbandaran, Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, Serta Kelompok Jabatan Fungsional.



Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020

BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam Rencana Startegis Jangka Menengah dijabarkan sebagai berikut :

| No | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan) | | 60 | 12 | 12 | 12 |
| | Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (orang) | 60 | | | | |
| 2 | Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta) | 700 | 770 | 1200 | 1400 | 1600 |
| | Jumlah lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP) | 1 | | | | |
| 3 | Jumlah rekomendasi pengelolaan SDI di WPP 712 (dokumen) | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (unit) | 80 | | | | |
| | Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (laporan) | | 80 | 180 | 180 | 180 |
| | Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen) | 100 | | | | |
| 5 | Jumlah Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (ton) | 47.452 | 47.460 | 48.883 | 50.350 | 51.860 |
| 6 | Jumlah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi) | 1 | | | | |
| | Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit) | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 8 | Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang) | 20 | | | | |
| | Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang) | | 30 | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi) | 1 | | | | |
| | Persentase penyampaian informasi perizinan pusat - daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) | 100 | | | | |
| 9 | Persentase kapal perikanan yang berizin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) | | 75 | 75 | 75 | 80 |
| 10 | IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (indeks) | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
| 11 | Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai) | 75,07 | | | | |
| | Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai) | | 75,07 | 75,07 | 75,07 | 75,07 |
| 12 | Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai) | 85 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 85,15 |
| 13 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) | | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| 14 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) | | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| 15 | Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai) | | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 16 | Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai) | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 |

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja Eselon IV. Matriks kinerja dalam struktur Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tahun 2020-2024 sebagaimana terdapat dalam **Lampiran I**.

B. KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non perbankan. Pendanaan APBN difokuskan untuk pengembangan sarana dan prasarana Kepelabuhanan Perikanan, penguatan fungsi dan peran, pemberdayaan dan berbagai kegiatan pembangunan lainnya yang

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang terkait dengan usaha perikanan tangkap. Sehingga ntuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi,dan program pembangunan perikanan tangkap, serta mencapai target sasaran utama yang telah ditetapkan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana **Lampiran I**

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tahun 2020-2024 digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, dan akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 25 November 2021

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Brondong



Ibrahim, A.Pi, M.Si

Lampiran I. Kerangka Pendanaan

| No | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | Alokasi Anggaran (Rp. Miliar) | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan) | | 60 | 12 | 12 | 12 | 12,10 | 13,02 | 14,10 | 15,02 | 16,10 |
| | Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (orang) | 60 | | | | | | | | | |
| 2 | Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta) | 700 | 770 | 1200 | 1400 | 1600 | | | | | |
| | Jumlah lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP) | 1 | | | | | | | | | |
| 3 | Jumlah rekomendasi pengelolaan SDI di WPP 712 (dokumen) | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 4 | Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (unit) | 80 | | | | | | | | | |
| | Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (laporan) | | 80 | 180 | 180 | 180 | | | | | |
| | Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen) | 100 | | | | | | | | | |
| 5 | Jumlah Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (ton) | 47.452 | 47.460 | 48.883 | 50.350 | 51.860 | | | | | |
| 6 | Jumlah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi) | 1 | | | | | | | | | |
| | Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit) | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7 | Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang) | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya (orang) | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (lokasi) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase penyampaian informasi perizinan pusat - daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Persentase kapal perikanan yang berizin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) | | 75 | | 75 | | 75 | | 80 | | | | | | | | | | |
| 10 | IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks) | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | | 75 | | | | | | | | | | |
| 11 | Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai) | 75,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai) | | 75,07 | | 75,07 | | 75,07 | | 75,07 | | | | | | | | | | |
| 12 | Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai) | 85 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | | 85,15 | | | | | | | | | | |
| 13 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) | | 72,5 | | 72,5 | | 72,5 | | 72,5 | | | | | | | | | | |
| 14 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) | | 72,5 | | 72,5 | | 72,5 | | 72,5 | | | | | | | | | | |
| 15 | Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai) | | 86 | | 86 | | 86 | | 86 | | | | | | | | | | |
| 16 | Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai) | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | | 89 | | | | | | | | | | |